



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI MURNI WAHYUNINGSIH
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 795095

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/239 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.613 m2/2.613 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 333 m2/333 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 463 m2/463 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **31.900.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, LAINNYA Rp. 7.500.000
4. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000
5. LAINNYA, GENIO SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **64.300.000**



D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 92.543.757

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.538.743.757

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.538.743.757

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.